

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NTB
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Laporan Kinerja BPSIP NTB TA. 2023 dapat kami selesaikan. BPSIP sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, BPSIP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memuat kinerja BPSIP NTB pada TA. 2023, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian LAKIN ini. Disadari bahwa LAKIN ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritikan untuk penyempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Namun demikian, diharapkan semoga LAKIN ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberi manfaat bagi penyelenggara kinerja BPSIP NTB pada masa yang akan datang.

Mataram, 30 November 2023
Kepala Balai,

Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi
NIP. 19671114 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP	2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Sumberdaya Manusia	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi	11
2.2. Misi	11
2.3 Tujuan	12
2.4. Kegiatan	12
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023	19
3.2. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi	28
3.3. Capaian Kinerja Lainnya	30
3.4. Akuntabilitas Keuangan	34
IV. PENUTUP	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 1.	Perkembangan Tenaga PNS BPSIP NTB berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019 – 2023	7
Tabel 2.	Perkembangan Jabatan Fungsional BPSIP NTB Tahun sampai bulan Agustus 2023	8
Tabel 3.	Perkembangan Jabatan Fungsional tertentu BPSIP NTB sampai 2012 - 2023	10
Tabel 4.	Rencana Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023	15
Tabel 5.	Penetapan Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023	16
Tabel 6.	Tingkat Capaian Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023	20
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023	22
Tabel 8.	Tingkat Capaian Kinerja Lainnya BPSIP NTB Tahun 2023	31
Tabel 9.	Revisi Anggaran Kegiatan BPSIP NTB TA 2023	33

DAFTAR GAMBAR

Gbr.	Uraian	Hal
Gbr 1.	Bagan Struktur Organisasi BPSIP NTB berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017	4
Gbr 2	Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021	26
Gbr 3	Nilai SMART pada aplikasi DJA	28
Gbr 4	QR code kontak aplikasi Android Whatsapp untuk kontak CS LP-BPSIP NTB	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai perundangan-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, maka BSIP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memuat kinerja BPSIP NTB pada TA. 2023, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun.

Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai salah satu organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Pertanian, dalam era globalisasi pembangunan pertanian yang dinamis membutuhkan adanya inovasi. Sebagai lembaga penghasil dan penerap standar instrumen pertanian BSIP NTB juga dituntut untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diamanatkan.

Sebagian besar kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dilaksanakan secara langsung oleh petani di bawah bimbingan fungsional dan penyuluh pertanian. Dengan demikian, program-program tersebut harus disesuaikan dan mudah dikerjakan petani dan penerap standar lainnya.

Sumber yang bersifat "*top-down*" dihasilkan dari institusi/lembaga pengujian estándar dan pusat-pusat standar. Sumber teknologi "*bottom-up*"

merupakan teknologi yang berasal dari petani berupa teknologi-teknologi konvensional, tradisional, berupa "*indigeneous technology*" atau lembaga-lembaga penghasil standar. Kedua sumber teknologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian perlu strategi khusus dalam meramu dan merakit teknologi dari kedua sumber tersebut secara lebih tepat.

Untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi tersebut di atas perlu mengakomodir kebutuhan daerah yang merupakan mitra kerja utama dari BPSIP NTB, yang tercermin dalam Rencana Strategis Pemerintah Propinsi NTB, dalam hal ini melalui Dinas Teknis terkait (pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan), juga harus mempertimbangkan Rencana Strategis instansi vertikalnya (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Rencana Aksi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian) serta Rencana Operasional BPSIP NTB sendiri.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya, BPSIP NTB dilengkapi dengan perangkat organisasi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 01/OT.050/H.12.17/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 . Dengan perangkat organisasi ini diharapkan BPSIP NTB dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yang tertuang di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian(BSIP) NTB merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berada di daerah. Secara administratif berada dalam koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

BSIP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

Sedangkan Fungsi BSIP adalah (1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.(2) Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument

di bidang pertanian (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian (4) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BPSIP NTB dibentuk berdasarkan Permentan No 13 tahun 2023. BPSIP NTB secara langsung berada dibawah Bdana Standardisaso Instrumen Pertanian kementerian Pertanian.

BPSIP NTB dipimpin oleh seorang Kepala Balai setingkat Eselon IIIA, dibantu oleh 1 unit struktural setingkat Eselon IVA, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, serta dibantu 2 Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Sub koordinator Program dan Evaluasi. Selain itu, dalam memudahkan koordinasi kegiatan litkaji dan diseminasi yang dilaksanakan Balai, BSIP NTB juga didukung oleh Kelompok Fungsional yaitu Kelompok Fungsional ASTA, PMHP, POPT, Kelompok Penyuluh, PBT, Keuangan dan kelompok fungsional lainnya.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPSIP NTB TA 2023

Untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi dan mengakomodasikan berbagai kegiatan strategis, maka dibentuk unit-unit kelembagaan internal BPSIP NTB dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang SOTK. Pembentukan unit kelembagaan internal BPSIP NTB bertujuan menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional kepada seluruh pejabat dan staf, sehingga tugas dan fungsi BPSIP NTB dapat berjalan lancar dan mencapai kinerja yang optimal. Pada TA. 2023 telah ditetapkan Struktur Organisasi, Personalia serta Uraian Tugas dan Tanggungjawab Personalia BPSIP NTB, sesuai SK Kepala BPSIP NTB Nomor 01/OT.050/H.12.17/01/2022 tanggal 02 Januari 2023, seperti disajikan pada Gambar 1.

Dalam SK tersebut dibentuk Sub Koordinator Program dan Evaluasi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan kinerja BPSIP NTB. Unit Program dan evaluasi dipimpin oleh seorang Koordinator Program dan Evaluasi. Demikian pula kelembagaan fungsional peneliti dan fungsional lainnya yang dipimpin oleh seorang Ketua fungsional. Sedangkan kelompok fungsional penyuluh pertanian dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian.

1.4. Sumberdaya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian khususnya BPSIP NTB berkewajiban melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan secara nasional baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) serta sumberdaya manusia.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, BPSIP NTB telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mulai tanggal 27 September 2010 dan terakhir diperbaharui sesuai standar ISO 9001:2015 pada 26 September 2019. Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi setiap UK/UPT dituntut untuk memiliki *standard performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, konsisten dan komitmen terhadap mutu pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik. Dalam memenuhi hal tersebut, BPSIP NTB memerlukan sistem manajemen mutu dalam bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada *stakeholders*.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam bekerja, salah satunya berupa disiplin kehadiran dengan mentaati jam kerja. Pelaksanaan disiplin bagi pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Pasal 3 butir 11 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Secara rinci komitmen Kementerian Pertanian terhadap reformasi dan komitmen terhadap PP 53 tahun 2010 lebih detail disusun dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman peningkatan disiplin pegawai dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Pada intinya PNS sebagai abdi Negara diharapkan dapat memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat menginisiasi terciptanya budaya kerja yang efisien, hemat, disiplin tinggi dan anti KKN. Dengan budaya kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif serta sumber daya PNS yang kompeten maka diharapkan dapat memberikan korelasi positif terhadap pelayanan publik yang bersifat *acceptable*, *applicable*, dan *accountable* yang pada akhirnya dapat menciptakan *good and clean governance* sebagai tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Selain hal tersebut prinsip pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dalam Permentan No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 menjelaskan tentang sistem pengawasan dan pengendalian internal (obyektif, transparan, institusional), partisipatif (melibatkan berbagai pihak terkait), berorientasi pembinaan (perbaikan sistem, metode, perilaku), mengutamakan pendekatan *reward* dan *punishment* yang bersifat edukatif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSIP NTB pada awal tahun 2023 sebanyak 74 orang dan pada tahun yang sama ada penambahan pegawai berasal dari rekrut tenaga PPPK sebanyak 2 (dua) orang, mutasi pegawai dari instansi lain sebanyak 3 (tiga) orang sehingga total pegawai berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Pada tahun 2023 terjadi pengurangan PNS sebanyak 4 (empat) orang, telah memasuki masa purna tugas an ; Seniman, S.Pi, Hamzah, Zamrini Aziz dan Ir. Kaharudin, dan 3 (tiga) orang ASN mutasi dari instansi lain an. ; 1). Rahmat Hasan, SP 2). Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP, 3). drh. Mutya Fadhilah.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, PNS BPSIP NTB merupakan lulusan SLTP hingga S3. PNS yang berpendidikan S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 17

orang, S1 sebanyak 29 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 19 orang, dan SLTP sebanyak 3 orang. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar di dalam negeri pada tahun 2022 sebanyak 4 orang, terdiri atas petugas belajar S3 sebanyak 1 orang, dan S2 sebanyak 3 orang. Dari 4 orang petugas belajar tersebut, semua telah menyelesaikan studinya an. Yurista Sulistyawati, SP, Fitria Zulhaedar, SP, dan Awaludin, S.Pt, M.Si. dan Yuli Yarwati, SP. Sedangkan PNS yang mengikuti izin belajar atas biaya sendiri di Universitas Mataram dan Unipersitas Alazhar sebanyak 8 (delapan) orang, dimana terdapat PNS yang sudah menyelesaikan studinya sebanyak 4 (enam) orang an. Eka Widiastuti, SP dan Baiq Arie Sudarmayanti, SP, Darwis, SP, Ria Rustiana, SST. Jumlah PNS yang masih menjalani izin belajar sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 4 (empat) orang.

PNS BPSIP NTB yang sedang mengikuti pendidikan S2 dengan izin belajar di Universitas Mataram sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Yanti Triguna, SP, Totok B. Julianto, SPt dan Nurul Agustini, SPt. Sedangkan PNS yang mengikuti pendidikan S1 dengan izin belajar di universitas Alazhar Mataram sebanyak 1 (satu) orang an. Slamet Nugroho, A.Md.

Perkembangan PNS BPSIP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 1. Perkembangan PNS BPSIP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir (2019 – 2023)

No	Tahun	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3/D4	SLTA	SLTP	SD	
1	2019	9	15	36	6	30	4	-	100
2	2020	9	15	38	5	28	4	-	99
3	2021	9	18	33	5	25	3	-	93
4	2022	3	15	30	4	22	3	-	77
5	2023	5	17	29	4	19	3	-	77

Sumber : Data Simprog BPSIP NTB

Tabel 1. memperlihatkan bahwa dominasi PNS BPSIP NTB berpendidikan S1 dan SLTA, yaitu 37,66% dan 24,68%, disusul S2 (55,08%), S3 (6,49%), D3/D4 (5,19%) dan SLTP (3,90%).

Sampai bulan Desember 2023, PNS BPSIP NTB berdasarkan jabatannya terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Jumlah pejabat struktural sebanyak 2 orang terdiri atas Kepala Balai (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IVa). Jumlah tenaga fungsional 43 (empat puluh dua) orang terdiri dari analis standardisasi sebanyak 9 orang, 2 (dua) orang analis standardisasi Pertama, 5 (lima) orang analis standardisasi Muda dan 2 orang analis standardisasi Madya. Jumlah Penyuluh sebanyak 22 orang, terdiri atas 5 (lima) orang Penyuluh Pertanian Pertama, 13 (tiga belas) orang Penyuluh Pertanian Muda dan 4 (empat) orang Penyuluh Pertanian Madya. Fungsional tertentu lainnya: Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 2 (dua) orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 3 (tiga) orang diantaranya Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda 1 (satu) orang dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama 2 (dua) orang, Pengawas Benih Tanaman Terampil 2 (dua) orang, Arsiparis 2 orang diantaranya 1 (satu) orang arsiparis muda dan 1 (satu) orang arsiparis pertama, Calon Teknisi Perekayasa Terampil 1 (satu) orang, analis keuangan 1 (satu) orang dan pranata computer 1 (satu) orang. Perkembangan jabatan fungsional tertentu BPSIP NTB (2019-2023) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan bulan Desember 2023 BPSIP NTB (2019 – 2023)

No	Jabatan Fungsional	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peneliti	27	27	28	28	-
2	Analisis Standardisasi (ASTA)	-	-	-	-	9
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	-	-	-	-	2
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	-	-	-	-	3
5	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	-	-	-	-	2
6	Penyuluh	19	19	19	19	22
7	Pustakawan	1	1	1	-	-
8	Arsiparis	2	2	2	2	2

9	Litkayasa	-	2	2	2	1
10	Analisis Keuangan	-	-	2	1	1
11	Pranata Komputr	-	-	-	-	1
Total		49	51	52	41	43

Sumber : Data Simprog BPSIP NTB

Dengan adanya transformasi kelembagaan, sejak September 2022 di BPSIP NTB terjadi perubahan jabatan fungsional peneliti yang beralih ke jabatan fungsional lainnya. Fungsional Peneliti yang beralih ke fungsional Analisis Standardisasi sebanyak 9 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 2 orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebanyak 3 orang, Pengawas Benih Tanaman sebanyak 2 orang, dan Penyuluh Pertanian sebanyak 3 orang

Tabel 3. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu BPSIP NTB (2019 - 2023) setelah Transformasi Kelembagaan

No	Jabatan Fungsional	Tahun 2023		Keterangan
		Sebelum Transformasi (Jan - Agst)	Setelah Transformasi (Jan - Des)	
1	Peneliti	28	-	11 orang peneliti pindah ke lembaga lain, 17 orang pindah jabfung lain
2	Penyuluh	19	22	3 orang peneliti beralih jabfung ke penyuluh dan 1 orang mutasi dari instansi lain
3	Pustakawan	1	-	1 orang pustakawan pensiun
4	Analisis Standardisasi (ASTA)	-	9	9 orang peneliti beralih jabfung ke Asta
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	-	2	2 orang peneliti beralih jabfung ke PMHP
6	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	-	3	3 orang peneliti beralih jabfung ke POPT
7	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	-	2	2 orang litkayasa beralih jabfung ke PBT
8	Arsiparis	2	2	-
9	Analisis Keuangan	2	1	1 orang pensiun
10	Litkayasa terampil		1	1 calon litkayasa
11	Pranata computer		1	-
	Total	52	43	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon III BSIP yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit BSIP melalui koordinasi BB Penerapan. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BSIP NTB menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan , yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Strategis BSIP NTB. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BSIP menjadi acuan visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BSIP NTB. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi, misi, tujuan dan sasaran BSIP NTB, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program-program kegiatan Tahun 2023, maka visi BSIP NTB kedepan adalah :

“ Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian “

2.2. Misi

Sedangkan misi BSIP NTB untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi, misi balai pada program penerapan yang tertuang dalam Renstra BSIP NTB, bertujuan:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BSIP yang akuntabel.

2.4. Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPSIP NTB menganut beberapa tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada di BSIP NTB. Tata nilai tersebut antara lain:

- 1) BPSIP adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan *Fast learning organization*.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja.
- 3) Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya mewujudkan *corporate management* yang baik.
- 4) Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari implementasi program-program penerapan dan diseminasi standar yang tertuang dalam Renstra BPSIP NTB adalah:

1. Dimanfatkannya standar bidang pertanian dan pengembangan teknologi terstandar pertanian spesifik lokasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik BPSIP NTB.

Sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di daerah, BPSIP NTB banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, baik lokal, regional, maupun nasional, dan bahkan internasional, mengingat makin canggihnya komunikasi dan transportasi di era globalisasi seperti sekarang ini. Beberapa isu strategis yang terkait dengan tupoksi dan mandat BPSIP NTB antara lain adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan nasional dan daerah, percepatan dan perluasan adopsi, kemasan hasil pengkajian untuk penyusunan kebijakan, biaya input relatif mahal, akses benih, perubahan iklim, ketahanan pangan di lahan marginal
2. Diseminasi hasil litkaji pertanian yang belum efektif, rendahnya nilai tukar petani, dan pengentasan kemiskinan.
3. Era otonomi daerah memberikan peluang kabupaten/kota menentukan sendiri program prioritas dan kebijakan-kebijakan, termasuk di sektor pertanian, memerlukan sinergi program yang lebih baik.
4. Dinamika masyarakat di daerah dan makin canggihnya komunikasi dan arus informasi membuka peluang makin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan teknologi pertanian.

Isu-isu strategis di atas membuka peluang, tantangan, dan bahkan mungkin juga ancaman untuk pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar yang menjadi mandat BPSIP. Peluang, tantangan dan ancaman tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang amat penting bagi BPSIP dengan stakeholder, terutama Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi wahana kerjasama dan integrasi program pembangunan pertanian supaya lebih efisien, efektif, dan terarah.
2. Kebutuhan teknologi di wilayah kerja BPSIP NTB harus didasarkan atas kebijakan nasional, daerah, dan kebutuhan pengguna teknologi (petani, dunia usaha, dan masyarakat luas).
3. Dinamika global, regional, dan lokal menuntut penyediaan teknologi yang lebih tepat.

4. Kerjasama dengan swasta dan luar negeri menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan teknologi dengan pendanaan APBN yang terbatas, alternatifnya dengan sharing budget.

Berdasarkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, strategi utama yang ditempuh oleh BPSIP NTB untuk melaksanakan tupoksinya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana penerapan standar dan diseminasi standar.
2. Mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif untuk menghasilkan inovasi pertanian yang bermutu dan berdaya saing.
3. Mengembangkan sistem standarisasi berorientasi pada dampak untuk pembangunan pertanian (*Managing research's impacts for Agricultural Development*).
4. Mengidentifikasi dan mengembangkan *core businesses* (Keunggulan) BPSIP NTB.
5. Membangun dan meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta, Luar Negeri, maupun pihak lain dalam rangka menggalang pendanaan.
6. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam kegiatan penerapan dan memasivkan diseminasi standar bidang pertanian.
7. Meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pusat/BB/Balai pengujian standar nasional.
8. Menajamkan prioritas kegiatan dalam rangka efisiensi, efektifitas, namun tetap dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan.
9. Membangun dan mengembangkan sistem kompetisi dalam penetapan proposal kegiatan.

Mengacu pada kebijakan umum penerapan dan diseminasi standar bidang pertanian yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, maka BPSIP NTB menetapkan kebijakan pertanian sebagai berikut :

1. Peningkatan fokus kegiatan dan capaian hasil penrapan standar berorientasi pasar/ referensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah
2. Peningkatan kuantitas/ kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian
3. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan inovasi pertanian
4. Peningkatan efektivitas manajemen institusi
5. Peningkatan kapabilitas manajemen untuk memperluas jejaring kerjasama.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.5.1. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sebagai lembaga penerap dan diseminasi standar pertanian, pada tahun anggaran 2023, BSIP NTB telah mengusulkan beberapa kegiatan penerapan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Perencanaan kegiatan Tahun 2023 tersebut mengacu pada RENSTRA BSIP dan BB Penerapan. Adapun rencana kinerja BSIP NTB Tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Rencana Kinerja BPSIP NTB 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah lembagayang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	6.010

3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	91

Total pagu kegiatan TA 2023 yaitu sebesar Rp 12.850.934.000 berdasarkan revisi 10 pada tanggal 30 November 2023.

2.5.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari BPSIP NTB dan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2023, BSIP NTB telah mengimplementasikan program penerapan dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui kegiatan-kegiatannya sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang sudah ditargetkan. Adapun penetapan kinerja tersebut secara rinci disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penetapan Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1

	Instrumen Pertanian	2. Jumlah lembagayang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	6.010
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa tenggara Barat (Nilai)	91

Perencanaan kegiatan tersebut kemudian dicapai melalui beberapa judul kegiatan diseminasi serta manajemen yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.5.3. Indikator Keberhasilan Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BSIP NTB adalah: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input yang digunakan oleh BPSIP NTB meliputi antara lain dana, sumberdaya manusia (SDM) atau fungsional yang melaksanakan kegiatan.
- b. Keluaran (output) adalah produk yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Keluaran yang dihasilkan oleh BSIP NTB umumnya berupa program/rencana, informasi/bahan diseminasi, database, pesyaratan teknis minimal, maupun rancangan SNI dan revisi SNI yang akan disampaikan pada *stakeholder* (BSIP, BB Penerapan, Lembaga/Instansi terkait dan penerap standar).
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil yang diharapkan dari masing-masing dari masing-masing kegiatan BSIP bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan tersebut. Hasil kegiatan diseminasi yang dihasilkan oleh BSIP NTB umumnya dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan maupun stakeholder lainnya.
- d. Manfaat adalah kegunaan dari suatu keluaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna.
- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja BSIP NTB pada tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan persetujuan Kepala Badan Standar Instrumen Pertanian, bahwasanya ada 4 (empat) sasaran utama yang akan dicapai oleh Balai. Sasaran utama ini selanjutnya dijabarkan dalam 5 (Lima) indikator kinerja. Pencapaian kinerja yang terlihat dari realisasi hingga akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai dengan **sangat baik**.

3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

BPSIP NTB mengacu pada Renstra Badan Standar Instrumen Pertanian dan BB Penerapan tahun 2020 – 2024, dalam menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2023. Standar kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) BSIP NTB yang telah ditandatangani oleh Kepala BSIP

Sejalan dengan perjalanan waktu, terdapat revisi Perjanjian Kinerja (PK) BSIP NTB terkait dengan anggaran kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut berisikan sasaran strategis, Indikator Kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2023.

Penilaian evaluasi kinerja tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, selain itu juga akan melihat permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi standar yang telah ditargetkan. Mempelajari capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun 2023 dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kinerja Balai, dengan harapan terjadi peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Rincian tingkat pencapaian kinerja BPSIP NTB Tahun 2023 dari masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Capaian Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	6.010	6.010
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80	84.25
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa tenggara Barat (Nilai)	91	92.53

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu acuan standar kinerja Balai dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya. Dengan demikian hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan mampu memberi gambaran kinerja penyelenggaraan kegiatan BSIP NTB di Tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) NTB Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2023, maka digunakan scoring yang mengelompokkan capaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian kinerja >100%); 2) berhasil (capaian kinerja 80% - 100%); 3) cukup berhasil (capaian kinerja 60% - <80%); dan 4) kurang berhasil (capaian kinerja <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan Balai.

Indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja bersumber dari dua jenis indikator yaitu indikator proses/aktivitas (*lead indicator*) dan indikator output/outcome (*lag indicator*). Indikator proses/aktivitas (*lead indicator*), merupakan indikator yang pencapaiannya ada dibawah kendali organisasi/Balai. Sedangkan indikator output/outcome (*lag indicator*) merupakan indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi/Balai. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dimana pada jenjang eselon I dan eselon II menggunakan jenis indikator outcome/output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja BSIP menggunakan *lag indicator*.

Berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan IKU dalam perjanjian kinerja, maka dari 3 (tiga) sasaran strategis Balai kemudian diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja output berupa : (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah lembagayang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai penerapan Instrumen Pertanian NTB (Nilai), dan (5) Nilai Kinerja Anggaran Balai

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai). Berdasarkan analisis dan pengukuran kinerja data hasil capaian kinerja BPSIP NTB tahun 2023 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP NTB Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	capaian	Kinerja
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	6.010	6.010	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80	84.3	105,4
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	91	92.53	101.6

yang
Akuntabel
dan
Berkualitas

Secara umum tingkat capaian kinerja BPSIP NTB TA. 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan balai sebagian besar telah tercapai. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, pencapaian kinerja untuk sasaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) NTB pada Tahun 2023 masuk dalam kategori **sangat berhasil** dengan nilai 101%.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 2 indikator kinerja yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI), dan 2) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Kinerja 1

Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI),

Standar Instrumen pertanian yang didiseminasikan merupakan standar instrument yang sudah memiliki SNI. Berbagai Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan antara lain

1. SNI Benih padi Inbrida
2. SNI Jagung
3. SNI Manggis
4. SNI Bibit Ayam Umur Sehari/KURI

5. SNI Jagung sebagai pakan ternak
6. SNI pemotongan halal pada unggas
7. SNI kualitas dan mutu daging
8. SNI seleksi telur konsumsi

Indikator Kinerja 2

Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Hasil penerapan (output akhir) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) adalah berapa lembaga yang menerapkan Standar Instrumen pertanian. Terkait dengan hal tersebut, maka output Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) dicapai melalui kegiatan berapa Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) yang dilakukan pada tahun berjalan :

Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen pertanian :

1. Pondok Pesantren Haramin
2. Kelompok Ternak Mertak Kelebu
3. Kelompok Ternak jaya mandiri

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Indikator Kinerja 1

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan pada tahun ini targetnya sebesar 6.010. Dari target 6.010 ini sudah tercapai 10 ton benih padi dan bibit doc ayam sebesar dari target 6.000 sudah tercapai 10.018. Dari hasil kegiatan ini capaian yang diperoleh sebesar **168.35 %**.

Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator ini merupakan indikator untuk mendukung sasaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Penilaian dikategorikan menjadi dua, yaitu 1) untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPBR Inspektorat Jenderal; 2) untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB.

Tahun 2023, hasil penilaian pembangunan zona integritas pada satker BSIP NTB didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Tim asesor adalah tim yang dibentuk oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) untuk melakukan penilaian mandiri terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkup BSIP.

Berdasarkan dokumen target kinerja Balai pada Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja (PK), nilai ZI menuju WBK/WBBM ditargetkan sebesar 80. Dan berdasarkan hasil penilaian ZI yang dikeluarkan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, untuk BPSIP NTB memperoleh nilai ZI sebesar 81,18 atau melebihi dari target capaian (**101.475 %**).



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 831250PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2621/PW.410/AJ/07/2021 29 Juli 2021
Lampiran :
Hal : Usulan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/RB.06/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021, kami mengusulkan Calon Unit Kerja WBK/WBBM Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021 sejumlah 29 (dua puluh sembilan), terdiri atas 6 (enam) calon unit kerja WBBM, dan 23 (dua puluh tiga) calon unit kerja WBK, dengan rincian sebagai berikut

No	Unit Kerja	Nilai Internal	Unit Eselon I
I Calon Unit Kerja WBBM, terdiri atas:			
1	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang	91.37	Balitbang
2	Balai Veteriner Denpasar	88.38	Ditjen PKH
3	Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	89.83	Ditjen PKH
4	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden	93.91	Ditjen PKH
5	Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang	90.53	Ditjen PKH
6	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	87.55	Ditjen Perkebunan

No	Unit Kerja	Nilai Internal	Unit Eselon I
II Calon Unit Kerja WBK, terdiri atas:			
1	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPMBTPH) Cimanggis	82.98	Ditjen TP
2	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	91.55	BPPSDMP
3	Pusat Penelitian Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciwati	83.46	BPPSDMP
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	82.38	BPPSDMP
5	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindang Malang	81.43	BPPSDMP
6	Balai Besar Veteriner Wates	89.87	Ditjen PKH
7	Balai Veteriner Lampung	89.83	Ditjen PKH
8	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMISOH) Gunung Sindur	88.63	Ditjen PKH
9	Balai Veteriner Subang	83.97	Ditjen PKH
10	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi	84.4	Ditjen PKH
11	Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor	91.78	Balitbang
12	Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BG Biogen)	90.78	Balitbang
13	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro)	85.04	Balitbang
14	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitana)	83.1	Balitbang
15	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Mataram	81.18	Balitbang
16	Balai Penelitian Ternak (Baliternak)	80.30	Balitbang
17	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Denpasar	91.32	Badan Karantina
18	Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) Bekasi	90.14	Badan Karantina
19	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Batam	87.15	Badan Karantina
20	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tarakan	86.81	Badan Karantina
21	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Gorontalo	86.39	Badan Karantina
22	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Balikpapan	86.37	Badan Karantina
23	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Mataram	84.63	Badan Karantina

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih



Tembusan:
Menteri Pertanian

Gambar 2. Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)

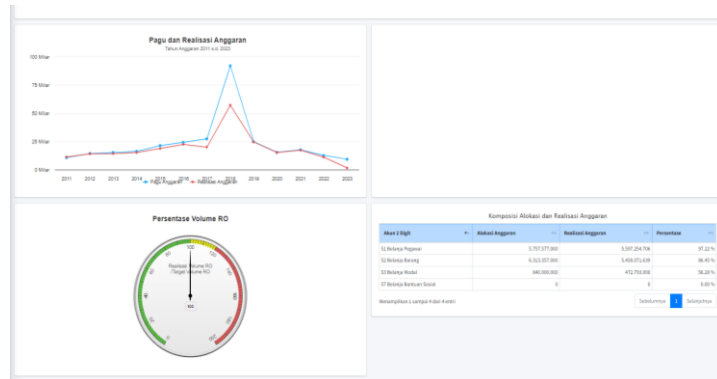
Indikator Kinerja 1

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dalam hal ini BPSIP NTB yang tertuang dalam bentuk dokumen anggaran dan digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Nilai kinerja anggaran berdasarkan Laporan Smart DJA pada Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan menggunakan aplikasi online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Dari hasil entry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai pada aplikasi yang juga disesuaikan dengan realisasi penarikan anggaran, maka nilai kinerja ini akan secara otomatis tercetak pada aplikasi SMART.





Gambar 3. Nilai SMART pada aplikasi Smart DJA Tahun 2023

Berdasarkan dokumen target kinerja Balai pada Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja (PK), nilai kinerja/SMART BPSIP NTB ditargetkan sebesar 91. Dan berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi Smart yang dibuat oleh Kemenkeu, untuk BPSIP NTB memperoleh nilai sebesar 92.53 atau sebesar **101.68 %** dari target capaian. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 91,89.

3.2 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan Balai sesuai Renstra 2020-2024. Keberhasilan capaian kinerja pada 5 tahun pelaksanaan Renstra sebelumnya tidak terlepas dari dukungan program dan dukungan anggaran kegiatan yang tertuang dalam DIPA Balai. Demikian pula pada pelaksanaan tahun 2023, keberhasilan capaian kinerja didukung pula oleh: 1) Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan; 2) Terjalinnnya komunikasi yang intensif dari masing-masing penanggungjawab terhadap capaian kerjanya; 3) Dukungan dan kerjasama dengan substansi teknis dari Pemda dan jajarannya; serta 4) Dukungan, partisipatif petani/peternak sebagai pengguna inovasi teknologi.

Masalah dan Kendala

Pencapaian kinerja kegiatan di BSIP NTB Tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu :

1. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa secara umum capaian kegiatan balai telah tercapai. Namun dalam pencapaian sasaran kegiatan tahun 2023 masih dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya anggaran kegiatan yang mengalami pemblokiran dalam jumlah yang besar.
2. Tidak tercapainya target PNBK karena adanya pemblokiran anggaran PNBK sampai saat ini.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja adalah : 1) melakukan perbaikan rencana kegiatan yang telah disusun di awal kegiatan dan RKA-KL, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait;

Untuk kegiatan Laboratorium pengujian, kegiatan konsultasi terkait pelayanan pengujian, pengguna juga dapat menghubungi kontak customer service (CS) LP-BPSIP NTB yang memberikan layanan online melalui aplikasi Whatsapp sesuai jam kerja. QR-code CS LP-BPSIP NTB yang dapat di scan ditampilkan dalam Gambar 7. Selanjutnya, contoh tanah/pupuk/tanaman dapat diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman, demikian pula dengan pembayaran dapat di transfer ke rekening BPSIP NTB.



Gambar 4. QR code kontak Aplikasi Android Whatsapp untuk kontak CS LP-BPTP NTB (<https://wa.me/qr/GM4A3UX6PCP4J1>)

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Capaian kinerja balai pada tahun 2023 dinilai berdasarkan target capaian output dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan berdasarkan target capaian output dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Beberapa output sudah disampaikan dalam capaian kinerja berdasarkan PK BSIP NTB Tahun 2023. Capaian output dalam dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2023, menetapkan output standar kinerja sebagaimana disajikan dalam Table 13. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, hasil pelaksanaan capaian kinerja BSIP NTB masuk dalam kategori **berhasil**. Secara umum tingkat capaian kinerja BPSIP NTB TA. 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan balai sebagian besar telah tercapai bahkan tingkat capaian beberapa kegiatan melebihi target yang sudah ditentukan dalam tahun berjalan.

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Lainnya BPSIP NTB Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	capaian Kinerja	katagori	
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100	Berhasil
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100	berhasil
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	6.010	6.010	100	Berhasil
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80	83	100	Berhasil

4	Terkelolan ya Anggaran Badan Standarisa si Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa tenggara Barat (Nilai)	91	92.53	101.6	berhasil
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	----------

Kegiatan pengkajian dengan output berupa disemiasi teknologi dan kegiatan produksi benih (padi, jagung) sampai dengan 30 November 2023 mampu melebihi target capaian nilai kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Sedangkan kegiatan lainnya berhasil mencapai nilai kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran kegiatan pengkajian, diseminasi dan manajemen Balai ditetapkan dalam DIPA BPSIP NTB. Pagu awal DIPA BPSIP NTB pada TA. 2023 adalah senilai Rp. 9.285.226.000. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran 2023, terjadi 10 (sepuluh) kali revisi DIPA. sampai saat ini anggaran BSIP NTB sebesar 12,910,934,000,-

3.4.1 Realisasi Keuangan

Dalam melaksanakan tupoksinya BSIP NTB pada TA 2023 mengelola Anggaran yang tertuang dalam DIPA. Berdasarkan sumber dana, secara rinci disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Anggaran BPSIP NTB Berdasarkan Sumber Dana, TA 2023

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	APBN	10.976.864.000,-	83.02
2.	PNBP	234,070.000,-	2.13
3.	Anggaran Loan	1.700.000.000,-	15.49
,-Total		12,910,934,000,-	100.0

Total anggaran yang dikelola BPSIP NTB dari sumber anggaran tersebut sebesar Rp. 12,910,934,000,-. Anggaran DIPA dari rupiah murni merupakan anggaran terbesar dana APBN yaitu 83.02%. Sedangkan anggaran kegiatan dana Loan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.700.000.000,-. Anggaran Satker BPSIP NTB dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2023 dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SP-DIPA-018.09.2.634040/2022 Tanggal 30 November 2022. DIPA BPSIP NTB TA 2023 mengalami sepuluh kali revisi yang berkaitan dengan perubahan pagu anggaran karena adanya kebijakan penganggaran. Jumlah pagu DIPA awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.285.226.000 ,- dan setelah revisi terakhir, pagu anggaran BPSIP NTB berubah menjadi Rp. 12,910,934,000.

BAB IV PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan pencapaian kerjanya menunjukkan bahwa kinerja BPSIP NTB Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sejalan dengan hal tersebut, BSIP NTB diharapkan terus melakukan kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik

dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah propinsi/kabupaten dalam setiap kegiatannya.

Realisasi keuangan satker BSIP NTB sampai dengan akhir TA. 2023 mencapai Rp. 11.572.835.849 (89.64%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2022 yaitu sebesar Rp 12,910,934,000,-. Dari masing-masing jumlah belanja, Anggaran Belanja Pegawai sebesar 2,034,630,464 , Belanja Non Operasional sebesar 3,437,627,299 dan belanja modal sebesar 472.793.000

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk menjaga capaian Balai, Manajemen BSIP NTB senantiasa berusaha menjaga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui beberapa komitmen yang disepakati bersama seluruh komponen yang ada di BSIP NTB.

Untuk kegiatan penerapan, diseminasi, dan manajemen dilakukan evaluasi progres capaian kegiatan setiap bulannya melalui pelaporan capaian kinerja pada masing-masing kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun pada dokumen Rencana Operasional Kegiatan

Evaluasi pada kegiatan rutin manajemen dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perkantoran, administrasi dan keuangan, serta kepegawaian berjalan sesuai dengan target kinerja. Sedangkan pada bagian kerjasama dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mendukung capaian kinerja balai sudah sesuai dengan tupoksi BSIP NTB dalam pendistribusian teknologi pertanian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Tahun 2023


KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB
JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA, LOMBOK BARAT 83371 NUSA TENGGARA BARAT
Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620
WEBSITE: <https://ntb.bsip.pertanian.go.id>; E-MAIL: bsp.ntb@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Awaludin Hipi
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Mei 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Awaludin Hipi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	6.010
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	91

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	3.090.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	3.090.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1.050.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	1.050.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	9.485.226.000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	2.567.726.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	6.917.500.000

Jakarta, 17 Mei 2023

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Awaludin Hipi